

BAB III

GERAKAN PEMUDA RAKYAT

3.1 Perkembangan Komunis di Sumatera Utara

Ide Marxisme mulai masuk di Sumatera Timur diwakili oleh Tan Malaka (1920-1921) yang pada waktu itu ia belum mengikatkan diri sepenuhnya pada gerakannya. P.K.I mulai masuk dan berdiri sepenuhnya pada tahun 1925 dibawah pimpinan Sutan Said Ali yang pada bulan Desember itu juga, P.K.I dengan mendadak mampu melancarkan pemogokan di pelabuhan Belawan., tepat pada saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda berkunjung ke Sumatera Timur, meskipun basis P.K.I adalah kaum buruh kota yang terorganisir.

Tetapi P.K.I adalah satu-satunya partai yang mendapat dukungan dan pengaruh yang besar dari kalangan buruh perkebunan, dan partai ini juga yang pertama sekali membawa pikiran-pikiran politik moderen kepada penduduk Karo yang masih memakai agama nenek moyang (agama Pemena)¹⁴ dan selama itu juga belum terjangkau oleh S.I.¹⁵ Pemberontakan pada tahun 1926-1927 di Jawa dan Sumatera Barat telah memberikan kekuasaan kepada pembesar-pembesar setempat untuk menggunakan semua alat refresif untuk menghancurkan P.K.I serta ormasnya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Diberlakukannya kekuasaan penahanan preventif memungkinkan polisi hanya dengan suatu keputusan pemerintah

¹⁴*Perbegu/Pembena* adalah agama orang karo yang percaya kepada arwah nenek moyang dan kekuatan alam.

¹⁵Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987. hal. 111

menangkap dan membuang semua pemimpin P.K.I ke Boven Digul dan Irian. Di antara orang yang dibuang pada tahun 1927-1928 itu terdapat seorang dari suku Toba terpelajar yang mendapat pendidikan Belanda, Urbanus Pardede yang memimpin sel P.K.I yang terdiri dari 9 orang di Pematang Siantar ia merencanakan aksi *teroris* di kalangan buruh perkebunan di Simalungun. Kesembilan orang tersebut diasingkan. Pengasingan telah dilaksanakan dalam skala yang sangat luas, oleh Van Kempen¹⁶ yang sangat keras dan Tegas dan terus-menerus oleh pengganti-penggantinya sebagai Gubernur Sumatera Timur, namun pada tahun 1931 sebanyak 19 orang yang dituduh komunis di Sumatera Timur dibebaskan, tokoh- tokoh P.K.I yang dibebaskan pada tahun-tahun berikutnya antara lain dua bersaudara Nerus dan Nolong Ginting Suka yang sebelum diasingkan memimpin P.K.I di Tanah Karo sampai akhir 1928-an bersama Xarim M.S seorang orator dari Aceh yang tidak diperbolehkan kembali ke Aceh.¹⁷

Selama tindakannya terhadap kaum “ekstemis” ini, Gubernur Van Kempen telah membangun seperangkat alat repressif yang luar biasa luasnya dalam ukuran standar Hindia Belanda waktu itu. Pada tahun 1926 dia menciptakan Gwestelijck Researche (intel provinsi), suatu badan penyelidikan khusus untuk Sumatera Timur yang pada tahun 1930 tumbuh mencapai lebih dari enam puluh pejabat tetap dan sejumlah spion gelap, selanjutnya dia memerintahkan dua organisasi kaum *onderneming* Belanda DPV dan AVROS untuk mendirikan organisasi intelnya sendiri untuk menyapu bersih oknum-oknum yang dianggap berbahaya di perkebunan-perkebunan.

¹⁶*Ibid.*, hal. 112

¹⁷*Ibid.*, hal. 80

Intel kaum Planter ini segera menjadi terkenal sampai di luar Sumatera Timur karena perlakuan-perlakuan kejam terhadap kuli-kuli kontrak yang dilakukan spion-spion kebonnya. Secara berangsur-angsur organisasi ini dibatasi hanya sampai melakukan tugas-tugas penyelidikan saja, tetapi telah berhasil untuk tidak memungkinkan kegiatan politik beroperasi di perkebunan. Kelemahan posisi kaum kuli kontrak yang setiap waktu bisa diasingkan atau ditahan, bersama larangan ketat orang luar berkunjung ke perkebunan-perkebunan telah membuat mereka berada pada kekosongan politik yang ditutup rapat dari dunia luar selama sisa zaman kolonial Belanda di Indonesia.

Kegiatan politik sesudah tahun 1927 sebagian besar hanya terbatas pada kota-kota penting terutama mengungkapkan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Mr, Iwa Kusuma Sumantri yang baru saja kembali ke Indonesia dengan segar bugar dari pengalamannya pada “Liga Melawan Imperilisme” di Eropa dan membuka kantor pengacaranya di Medan, telah mencetuskan daya gerak yang luar biasa kepada rasa dan cita kebangsaan ini lewat surat kabarnya yang berumur pendek ”*Matahari Indonesia*” dan dorongannya mendirikan serikat buruh dikalangan supir dan pegawai negeri. Delapan belas bulan kemudian tokoh ini diasingkan Belanda ke Banda neira.¹⁸ hampir semua organisasi di Sumatera Timur sudah lebih bercorak nasional, salah satunya Partindo (Partai Indonesia), partai politik kedua yang didirikan Soekarno, mulai tumbuh suatu bangunan partai nasional yang kuat dan bersifat merakyat di daerah ini. Dua tokoh asal Mandailing yang mempunyai kharisma, Abdul Hamid Lubis dan Mohammad Joni, bisa menarik pengunjung yang besar jumlahnya pada

¹⁸*Ibid.*, hal. 113

rapat-rapat umum Partindo di Medan dan Siantar pada awal tahun 1930-an¹⁹. Sebelum Partindo dilumpuhkan oleh Belanda di seluruh Indonesia dengan menyatakan larangan terhadap semua bentuk rapat umum pada tahun 1934, terlebih-lebih yang dialami cabang-cabang di Sumatera Timur sudah dilumpuhkan dengan cara penangkapan yang terus-menerus terhadap pemimpinnya dan larangan pada setiap kegiatan di Kerajaan Langkat. Hamid Lubis dibuang pada tahun 1934, kemudian partai tersebut dilarang mengadakan kegiatan oleh Belanda, akhirnya terhentilah kegiatan partai tersebut pada tahun 1936. Lenyapnya Partindo, muncullah partai pimpinan Hatta dan Syahrir, yaitu PNI. Partai ini kemudian lebih mampu dan berpengalaman dalam melaksanakan rapat-rapat umum sehingga terhindar dari Belanda. Tetapi pada hakekatnya gerakan perjuangan politik memang dapat ditentang oleh Belanda pada pertengahan tahun 1930-an.

Sebuah laporan pemerintah Belanda pada tahun 1935 dengan ringkas menyampaikan faktor-faktor yang menghambat gerakan nasional Indonesia di Sumatera Timur sebagai berikut :

- a. Perbedaan dasar dalam sifat-sifat nasional, ras dan agama, serta pertentangan kepentingan ekonomi di kalangan penduduknya;
- b. Ketiadaan yang tetap akan barisan cendikiawan dan pemimpin-pemimpin yang terpelajar dan berasal dari anak negeri, dibanding dengan mereka yang sebagian besar berasal dari daerah lain.
- c. Kesulitan kontak langsung dengan masing-masing pengurus pusat gerakannya ditempat lain (antara lain);

¹⁹*Ibid.*

- d. Penduduk suku-suku pribumi yang konservatif pada umumnya tidak mempunyai selera dalam masalah-masalah politik;
- e. Akhirnya, tindakan-tindakan yang lebih ketat dijalankan oleh gubernemen sejak Agustus 1933, dan telah melengkapi alat-alat kekuasaan gubernemen dan polisi sehingga dapat bertindak keras terhadap kegiatan-kegiatan yang anti gubernemen.

Faktor yang kelima di atas ini memerlukan perhatian khusus, sejak tindakan-tindakan keras Van Kempen terhadap PKI telah disadari bahwa kekuasaan kelima sultan yang terikat dengan perjanjian jangka panjang dengan Belanda, dan berisi antara lain hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pikiran, dapat dipergunakan untuk kepentingan rezim Belanda. Kebencian para sultan terhadap perantau “asing”, yaitu orang-orang kaya baru yang tidak tahu adat, serta menjadi saingan-saingan beratnya dalam menjalankan hubungan dengan Belanda. Tetapi kerajaan tidak akan dapat menjalankan tindakan keras terhadap kaum politik tanpa restu gubernemen. Soalnya pemerintahan provinsi tidak menumpas kaum nasioanalis lewat sultan-sultan ini dari yang telah dilakukan pemerintah secara terbuka, sehingga dengan demikian mengalihkan sasaran kritik terhadap tindak kekerasan ini ke alamat sultan-sultan itu. Kesultanan langkat menjadi daerah pertama melarang kegiatan Partindo pada tahun 1933, sedangkan usaha partai itu mendirikan cabangnya di kesultanan Asahan pada tahun 1935 telah dihancurkan tanpa kesulitan oleh pihak kesultanan. Kebijakan politik ini mengakibatkan pertentangan tajam antara partai-partai nasional dan kerajaan, namun sama sekali tidak menjadi persoalan bagi Gubernemen Hindia Belanda. Justru ini adalah salah satu dari tuntutan kaum

nasionalis, termasuk kaum moderatnya , untuk mengalihkan wewenang mengenai hak politik untuk bebas berserikat dan berkumpul dari kelima kesultanan itu kepada pemerintah pusat. Pengalaman kaum politik dalam melakukan tindakan-tindakan represif yang di praktekkan kesultanan jauh lebih sering menjadi sumber pokok rasa tidak puas dari pemborosannya yang berlebih-lebihan dan sifat-sifatnya yang sudah ketinggalan zaman.

Seperti pada bagian-bagian lain di Indonesia, situasi yang tidak memungkinkan bagi kegiatan politik pada tahun-tahun 1930-an itu telah menggerakkan kaum nasionalis dari berbagai aliran yang mencurahkan usahanya dibidang kemasyarakatan yang lebih luas. Bank, perusahaan-perusahaan asuransi, berbagai jenis usaha, koperasi telah didirikan berdasarkan prinsip nasional percaya kepada diri sendiri, menolak orang-orang Eropa dan Cina yang menguasai ekonomi negeri itu. Terutama telah bangkit kegairahan memperluas sarana dan keperluan pendidikan.²⁰

Budi Utomo adalah organisasi yang pertama bergerak dalam bidang pendidikan upaya yang dilaksanakan adalah mendirikan sejumlah sekolah-sekolah yang pada awalnya ditujukan untuk anak-anak buruh. Dengan berkembangnya kesadaran nasional, beberapa dari sekolahnya ini telah dialihkan menjadi perhimpunan pendidikan *Taman Siswa* yang membuka cabangnya yang pertama di Sumatera pada tahun 1929 yakni di Medan. Meskipun pusatnya di Jawa, namun oleh Sogondo Karto prodjo sejak tahun 1934 di Medan, Taman Siswa yang didasari oleh

²⁰*Ibid.*, hal. 115

cita-cita nasional terus membuahkan hasil dengan banyaknya penduduk setempat ikut bergabung.

Sepinya kehidupan politik di Indonesia pada tahun 1930-an merupakan impian bagi Belanda karena tidak menyadari bahwa suasana yang kelihatannya begitu tenang hanya terutama di ciptakan oleh pengawasan polisi yang begitu pada kaum pergerakan nasional yang telah berkembang secara meluas dan mendalam selama masa itu, sedangkan politik Belanda terus dengan ketat mengasingkan mereka dari kerajaan. Dalam berbagai macam bentuknya kaum pergerakan telah berhasil meningkatkan perjuangannya sehingga terwakili dalam lapisan-lapisan masyarakat Indonesia yang lebih terpelajar dan moderen, sedangkan sultan-sultan Melayu semakin menjalankan posisi bertahan dengan hanya berlandaskan kesetiaan mutlak warga rakyatnya yang langsung di bawah kekuasaannya yang di backing oleh Belanda.²¹

3.2 Berdirinya Persatuan Sumatera Timur

Pada akhir tahun tiga puluhan orang-orang pergerakan di Sumatera Timur kembali mendapat kesempatan menyalurkan aspirasi politiknya, terutama lewat Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) dan Parindra (Partai Indonesia Raya). Bahwa telah didirikan dua partai nasional, bukan satu saja, lagi-lagi sebagian besar disebabkan tekanan Refresif Belanda. Pegawai-pegawai pemerintah tidak di izinkan menjadi anggota partai-partai politik yang berhaluan radikal kerakyatan seperti Partindo, dan kemudian Gerindo. Karena sedikit lowongan terbuka bagi orang-orang

²¹*Ibid.*, hal. 119

Indonesia lulusan sekolah menengah atau lebih tinggi lagi maka dalam prakteknya tumbuh perbedaan yang tajam dalam mata pekerjaan masing-masing antara sejumlah kecil pejabat pemerintah dan para ahli yang masuk menjadi anggota Parindra yang relatif moderat itu dan sebagian besar mereka masuk dalam arus besar Partindo dan Gerindo.

Parindra berdiri pada tahun 1935 sebagai fusi dari Budi Utomo dan Studie Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Cabangnya di Sumatera Timur telah banyak menarik berbagai macam aliran seperti; saudara Tua Sutan Syahrir, Sutan Noer Alamsyah serta dua orang pemuda yang radikal S.M. Tarigan dan Mr. Laut Tarigan yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh P.K.I terkemuka.

Gerindo didirikan secara nasional pada tahun 1937²² di atas prinsip bahwa front persatuan melawan fasisme membenarkan kaum nasionalis yang condong ke Marxisme untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan pertimbangan taktis di Sumatera timur garis politik ini segera disambut sebagai suatu kesempatan bekas bagi anggota-anggota Partindo yang nasionalis radikal untuk kembali bernegosiasi, dengan harapan akan berkurangnya perlakuan represif dari pemerintah. Pemimpin Partindo di Sumatera timur, Abdul Hamid Lubis berada di pembuangan Digul, dan Jauhari Salim berada di Rumah sakit gila pada tahun 1937.²³ Tokoh ketiga M. Joni menjadi tokoh partai utama yang baru muncul. Beliau bersama dengan pengurus daerah Gerindo lainnya muncul dari generasi muda partindo, yaitu Jacub Siregar, M.Omaer Said (Surapati), dan Adnar Noer Lubis. Sebelumnya mereka

²²*Ibid.*, hal. 121

²³*Ibid*

ini telah bertahan hidup sebagai wartawan politikus sambil menjadi pokrol bambu. Pimpinan cabang Gerindo di kota-kota besar seperti Medan dan Siantar berasal dari kaum kecil terutama dari pedagang , pengrajin tukang jahit dan kerani pada perusahaan Cina dan Indonesia. Partai ini juga mendirikan cabangnya di kota-kota kecil seperti Binjai, Arhemia, dan Tanah Jawa (semua tahun 1938), Kisaran Sunggal (1939), Tanjung Balai dan Kabanjahe (1940). Paling sedikit tiga dari cabang-cabang ini menempatkan petani yang sederhana sebagai unsur yang pokok dalam pimpinannya. Petani karo dari dusun Deli di cabang Sunggal dan Arnhemia, petani pendatang Toba di Tanah Jawa. Sejak pembentukan dan pendudukan Jepang, Gerindo adalah partai terbesar dan yang paling efektif di Sumatera Timur.²⁴

Cabang-cabang Gerindo di Sumatera Timur mencerminkan Nasionalis yang sama dengan pendahulunya, Partindo, dan mereka berulang-ulang meminta pimpinan pusatnya di Batavia untuk meninggalkan sikap kooperasinya dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada gilirannya, Gewestelijk Resershe (Intel Belanda) kembali menemui musuh-musuh utamanya dan tidak membung-buang waktu dan menekankan pembatasan-pembatasan, sedapat mungkin berdasarkan Hukum. Joni dilarang meneruskan pidatonya ketika dia menyinggung masalah perjuangan kemerdekaan pada rapat umum pertama Gerindo di Medan.

Residen di Sumatera Timur secara langsung meminta kekuasaan dari Batavia untuk membungkam tokoh ini untuk seterusnya. Karena politik masih bersifat lunak kepada Gerindo, maka pembesar-pembesar di Sumatera Timur hanya dibolehkan mengeluarkan larangan kepada M. Joni untuk menghindari semua pertemuan politik

²⁴*Ibid.*, hal. 124

dalam batas waktu tiga bulan sejak September 1938. Selanjutnya Joni dan Adnan Noer Lubis untuk tiga bulan lagi sejak april 1939, sementara itu, pada bulan Desember 1938, polisi Sumatera Timur mendapat izin dari pemerintahnya untuk boleh menghadiri semua pertemuan yang diadakan Gerindo sebelumnya, spion-spion gelap Gewestelijk Research sudah melaporkan semua rapat yang diadakan, bahkan kursus politik hanya diberikan semata kepada anggota, tetapi mereka tidak boleh langsung campur tangan atau bertindak.

Akhirnya pertumbuhan pergerakan nasional yang semakin luas dan kuat membawa pengaruh pada penduduk asli Melayu Sumatera Timur sampai akhir 1930-an. Ternyata aristokrasi Melayu yang pendidikan langsungnya segera dibatasi, telah menerima pikiran bahwa setiap masalah mengenai orang melayu haruslah diselesaikan lewat tradisi istana.

Gerakan pertama perubahan di mulai oleh sekelompok orang Melayu biasa yang mengecap pendidikan Belanda di Medan yang mendirikan “Persatuan Sumatera Timur” (PST) pada bulan april 1938. Dua tokohnya yang terkemuka, yaitu Abdul Wahab dan Zahari, adalah guru-guru yang benar-benar menyadari keterbelakangan tiga suku asli Sumatera Timur dalam pendidikan dan bidang kemajuan lainnya. Salah satu keprihatinan mereka yang terutama ialah semakin banyaknya orang-orang Batak Toba yang Kristen dan kurang bisa dibaurkan itu mengisi jabatan guru dan pegawai negeri di Sumatera Timur karena ketiadaan anak sendiri yang bisa memenuhi syarat-syaratnya.

Perkumpulan ini mencatat banyak kemajuan pada bulan-bulan pertama didirikannya, terutama dikalangan orang-orang Melayu, Karo dan Simalungun di kota-

kota yang tidak senang terhadap posisi yang kuat tersebut dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama ialah kesulitan dalam merumuskan siapa yang dinamakan anak Sumatera Timur yang berhak untuk diterima sebagai anggota. Setelah pembicaraan yang larut akhirnya diterima sebagai anggota. Kemudian untuk selanjutnya ditetapkan bagi semua mereka yang menganggap Sumatera Timur sebagai Kampung halamannya sendiri dapat diterima sebagai anggota dalam golongan rendahan. Kriteria ini telah ditentukan sesuai dengan aturan yakni golongan B, C dan D, sedangkan golongan A terdiri dari anggota-anggota yang nenek moyangnya sudah menetap di daerah itu sebelum Sumatera Timur di buka oleh perkebunan Eropa pada tahun 1860-an. Ketentuan yang sudah dijalankan ini ternyata tidak mengakhiri percekocokan intern maupun kritik-kritik yang muncul, karena organisasi ini sebenarnya ditujukan untuk menghadapi suku-suku lain di luar Melayu.

Hal kedua yang dihadapi PST ialah sama yang dihadapi perhimpunan “persatuan“ yang didirikan dengan maksud serupa oleh penduduk Melayu di Malaya, yaitu mengenai adat, kesetiaan dan segala pujian yang harus diberikan oleh Melayu kepada Sultan-sultannya. Awalnya dalam persatuan itu terdiri dari orang-orang Melayu biasa yang mengeluh tentang adanya rintangan-rintangan yang menghambat kemajuan PST dan menghadapi perlawanan dari mereka yang “takut PST itu menjadi sebuah perhimpunan radikal atau kiri” yang senantiasa memohon kerja sama dengan pihak raja-rajanya, maka sebenarnya mereka mewakili penderitaan seorang ibu yang melahirkan suatu gagasan pemikiran baru dalam struktur kekuasaan Melayu.

Walaupun Persatuan Sumatera Timur menyatakan kesetiaan dan sifatnya non politik tetapi dimata raja-raja kehadiran PST merupakan suatu tantangan terhadap

kepemimpinan mereka apalagi jika perkumpulan itu di pimpin oleh orang-orang kota biasa. Aristokrasi melayu tetap saja menjauhkan diri, sedangkan banyak bantuan dan pengikut pertamanya adalah mereka yang sudah pindah dan terlepas dari adat kebiasaan kampungnya. Cabang pertamanya di Medan mempunyai sekretaris pengurus seorang karo yang menjadi anggota Gerindo. Pada bulan Oktober 1938 seluruh pengurus cabang Medan meletakkan jabatannya setelah terjadi konflik yang tidak terselesaikan dengan pengurus lainnya. M.Said seorang wartawan terkenal yang dipecat pengurus Parindra karena ikut mendirikan PST juga ikut keluar, sementara pemimpin-pemimpin lainnya terus merayu-rayu elite Melayu, dengan hati-hati menekankan akan kepentingan suku anak negeri.²⁵

Kebijakan ini mendapatkan imbalannya pada konferensi besar pertama PST bulan Februari 1940 dimana kekuasaan melayu yang mapan itu secara dramatis mendemonstrasikan perubahan sikapnya. Putra-putra Mahkota Kesultanan Deli dan Serdang merestui dan tokoh-tokoh cendekiawan nigrat Melayu menyediakan dirinya untuk menjadi pimpinan. Dr. Tengku Mansur paman Sultan Asahan dipilih menjadi ketua dan Mr. Tengku Bahriun dari Deli dijadikan sekretaris, sedangkan pimpinan semula yang terdiri dari orang-orang biasa dijadikan anggota pengurus. Dengan ini perkembangan pesat PST sudah terjamin. Aristokrat-aristokrat terpelajar dari setiap daerahnya membentuk cabang-cabangnya, termasuk dua cendekiawan terkemuka dari Simalungun, yaitu Madja Purba dan Mr. Jaidin Purba, yang duduk di cabang Siantar.

²⁵*Suku anak negeri* adalah suku-suku yang telah mendiami Sumatera Timur sebelum kedatangan Belanda

Menjelang tahun 1941 PST sudah mempunyai lebih dari 900 anggota di seluruh Provinsi itu. Nilai dari sukses ini adalah sifat konservatif yang telah melibatkan PST, begitu organisasi ini menampilkan dirinya sebagai suatu hierarki yang tidak begitu berbeda dari masyarakat Melayu sebagai suatu keseluruhan. Perubahan yang dikandungnya mempunyai arti penting yang sangat mendasar dalam memperluas kepribadian masing-masing daerah kecil atau rasa kelompok suku ke seluruh daerah Sumatera Timur. Upaya untuk membentuk segolongan kaum ningrat yang terpelajar dan berdaya mampu untuk menjadi pemimpin yang ampuh dalam memperjuangkan “untuk pertama sekali perhatian dikalangan istana sebagai suatu perkumpulan yang didirikan oleh dan untuk rakyat”. Namun dibawah pimpinan Dr. Mansur organisasi ini bertentangan sangat tajam dengan pergerakan nasional secara menyeluruh mengenai sikap alon-alon, sifat hierarki, pro pemerintah serta gaya eksklusifnya. Dalam hubungannya dengan pergerakan nasional secara menyeluruh PST adalah Ibarat “orang kena Pukau” suaranya tidak pernah terdengar, tanpa kekuatan menghadapi soal apapun yang baru, masih senang saja dalam kealpaanya.

Latar Belakang Pemuda Rakyat Tanah Karo

Berdirinya Pemuda Rakyat di Tanah Karo Tidak terlepas dari berkembangnya paham marxisme di Sumatera Timur yang pada mulanya dibawa oleh Tan Malaka seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dari awal masuknya paham ini ketertarikan masyarakat sangat kuat, khususnya masyarakat Karo, yang sejak tahun

1872 dijajah oleh kesultanan²⁶ yang dibiayai oleh pengusaha Belanda dan menjadi musuh bebuyutan perkebunan dari awal berdirinya sampai Belanda menyatakan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948.

Perkembangan partai dan paham-pahamnya baik nasionalis, agamais, sosialis maupun komunis sangat menarik perhatian masyarakat Sumatera Timur, khususnya masyarakat Karo yang tidak mempunyai keterikatan kelas seperti suku-suku yang ada di Sumatera Timur pada umumnya, terutama paham komunis yang dari awal perjuangannya sangat memperhatikan nasib kaum buruh, tani, nelayan dalam perjuangan kelas yang menjadi salah satu andalan agitasi komunis yang sangat efektif untuk merangkul kekuatan tani yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Karo. Partai komunis merupakan partai yang paling cepat perkembangannya dan paling besar pengaruhnya dalam perjuangan perebutan tanah di Sumatera Timur yang secara langsung mempengaruhi pola pikir dan pandangan masyarakat Karo. Sehingga tidak mengherankan partai ini dapat merebut hati masyarakat Karo.

Partai komunis yang telah menanamkan pengaruhnya di Sumatera Timur terus melakukan pengkaderan sampai kedaerah-daerah salah satunya adalah Tanah Karo dari hulu²⁷ pada zaman kolonial sampai Tanah Karo yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1942 P.K.I telah membentuk struktur organisasi di sana sekaligus mengembangkan organisasi kepemudaanya yaitu *Pesindo*²⁸

²⁶Martin L. Peranginangin, *op.cit.*, hal. 77

²⁷Deli, Langkat, Serdang pada masa penjajahan Kolonial merupakan daerah pemukiman masyarakat Karo.

²⁸*Pesindo* sebuah organisasi yang terbentuk pada 10 November 1945 dari fusi beberapa organisasi kepemudaan dan resmi menjadi organisasi sayap PKI pada tahun 1947 setelah PKI melakukan Infiltrasi terhadap organisasi-organisasi yang berbeda haluan. Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, hal. 66

BAB IV

GERAKAN PEMUDA RAKYAT DI TANAH KARO

4.1 Struktur Kengurusan Organisasi Pemuda Rakyat di Indonesia

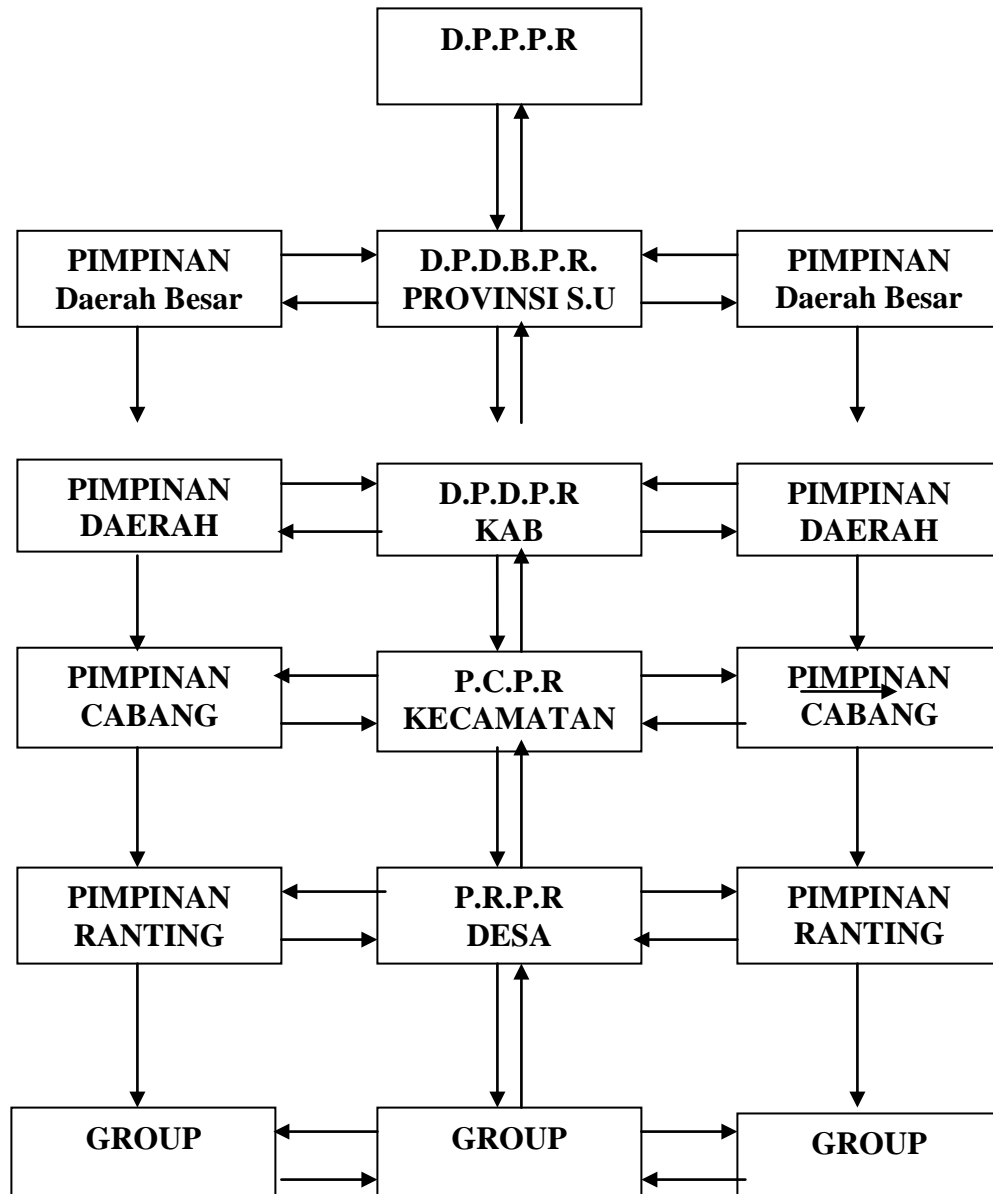
Struktur kepengurusan Pemuda Rakyat sangat komplis dari pusat atau Nasional sampai ketingkat group (kelompok-kelompok diskusi di tingkatan kelurahan, inilah yang membuat Pemuda Rakyat begitu dikenal dan dekat dengan segala lapisan masyarakat, ditambah lagi aktivitasnya yang sangat tinggi baik aktivitas internal maupun eksternal, selain dari segi kuantitas, kualitas Pemuda Rakyat tidak diragukan lagi jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi pemuda lainnya, selain mampu menganalisis situasi baik lokal/tingkatan desa, regional/provinsi, nasional maupun internasional, sehingga perkembangan dan pemahaman Pemuda Rakyat sejalan dengan cepatnya informasi yang diterima secara estapet dan selalu dibahas dari pusat hingga ke tingkatan terkecil sekalipun mengenai perkembangan ekonomi, politik dan sosial agar tidak salah dalam memahami pokok-pokok perjuangan dan ideologi yang sangat anti dengan monopoli, penindasan, kapitalisme, imperialisme dan feodalisame, karena semuanya dianggap sebagai penghambat kemajuan revolusi yang dicita-citakan oleh partai dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.²⁹

Pemuda Rakyat merupakan organisasi kader yang berbasis massa, seluruh lapisan masyarakat dapat langsung menjadi anggotanya, setelah melalui proses yang

²⁹Wawancara dengan Jenda Tarigan, Seketaris I Pemuda Rakyat Tanah Karo dan anggota Pleno CDB PKI 1962

sudah ditentukan oleh organisasi, salah satunya adalah mengikuti forum dan diskusi yang diadakan group-group di tingkatan desa yang akan dilanjutkan dengan pendidikan politik dan ideologi yang diselenggarakan oleh partai dan Pemuda Rakyat sebagai salah satu syarat mutlak, demi kemurnian cita-cita dan arah perjuangan dan ideologi yang akan diemban oleh setiap kader maupun anggota Pemuda Rakyat. Forum dan diskusi menjadi salah satu cara yang diandalkan oleh Pemuda Rakyat dalam mempropagandakan, membangun dan mengembangkan ideologi dan cita-cita partai yaitu "*komunisme*". Dalam forum dan diskusi sangat banyak informasi, pemahaman-pemahaman dan ide-ide yang cemerlang menyangkut sebuah permasalahan sosial, ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan, karena topik-topik yang dibahas diutamakan masalah-masalah terdekat dengan komunitas penduduk setempat yang ikut atau menjadi anggota Pemuda Rakyat, sehingga forum dan diskusi yang diadakan sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan umur.

Struktur Kepengurusan Pemuda Rakyat



Struktur ini menggambarkan system komunikasi pengurus Pemuda Rakyat dari pusat sampai ke tingkat Group sebagai sebuah hierarki yang saling berhubungan

timbang balik, kepemimpinan dipegang secara kolektif sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan diambil atas nama pribadi, kebutuhan-kebutuhan organisasi akan diselesaikan dalam sidang-sidang pleno sebagai wadah pengambilan kebijakan. anggota-anggota pleno diangkat secara otomatis dari pengurus-pengurus struktur dibawahnya.

D.P.P.P.R (Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Rakyat)

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Anggota Pleno
6. Seksi-Seksi

D.P.D.B.P.R (Dewan Pimpinan Daerah Besar Pemuda Rakyat)

1. Sekretaris I
2. Wakil Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota Pleno
5. Seksi-Seksi

D.P.D.P.R (Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Rakyat) Kabupaten Karo Tahun 1961³⁰

1. Sekretaris I : Jenda Tarigan
2. Wakil Sekretaris : Jurung Sinuraya
3. Bendahara : Riahta Br Sembiring
4. Anggota Pleno : Ambil Ginting
5. Seksi-Seksi : Jiman Karo-Karo

P.C.P.R (Pimpinan Cabang Pemuda Rakyat)

1. Seretaris I
2. Wakil Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota Pleno
5. Seksi-Seksi

P.R.P.R (Pimpinan Ranting Pemuda Rakyat)

1. Sekretaris
2. Wakil Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi-Seksi
5. Pinpinan Kelompok

³⁰Wawancara dengan Ambil Ginting, Anggota Pleno Pemuda Rakyat KAB. Karo, Guru Sekolah Ideologi Kabupaten Karo (1956-1965) dan sampai sekarang pertua di Gereja GBKP Kandibata.

GROUP

- Anggota-Anggota

4.2 Aktivitas Internal Pemuda Rakyat

Sejak berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemuda Rakyat di Tanah Karo Kantor Partai ditempatkan di Berastagi

Perkembangan Partai dan Pemuda Rakyat pada tahun 1963 dipindahkan ke Kaban Jahe Jalan Irian No. 4. Di kantor inilah segala kegiatan Pemuda Rakyat di Tanah Karo diatur.³¹

Tenaga fulltimer di daerah (di kantor) sebanyak tiga orang untuk memberi dan menerima informasi ketingkat cabang dan ranting. Pimpinan daerah mengadakan sidang atau pertemuan dengan anggota pleno yang berjumlah lima belas orang untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah ada yang sedang dilaksanakan.

Seksi-Seksi

Seksi-seksi ditingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting pada dasarnya sama, yaitu:

1. Seksi Ideologi
2. Seksi Organisasi
3. Seksi Kebudayaan
4. Seksi Front Pemuda
5. Seksi Olah Raga

³¹Wawancara dengan Ambil Ginting, Anggota Pleno Pemuda Rakyat KAB. Karo, Guru Sekolah Ideologi Kabupaten Karo (1956-1965) dan sampai sekarang pertua di Gereja GBKP Kandibata.

6. Seksi Ekonomi

Fungsi dan Program Kerja:

1. Seksi ideologi

Program kerja utama Seksi Ideologi pada waktu itu adalah Pendidikan Ideologi dan Politik, karena prinsip Pemuda Rakyat “Merah dulu baru Ahli”

- Pendidikan Ideologi dan Politik Tingkat Daerah/Kabupaten dilaksanakan oleh Tingkat Propinsi yang disebut Sekolah Pemuda Daerah Besar, para siswanya adalah kader-kader utusan daei tiap-tiap kabupaten Sumatera Utara.
- Khusus untuk Pemuda Rakyat Tanah Karo yang melaksanakan pendidikan adalah Seksi Ideologi dan Politik di Tingkat Cabang/Kecamatan yang nantinya tugas kader-kader cabang mendidik kader ranting dan anggota-anggotanya. Pendidikan dan politik di tingkat Ranting/ anggota-anggota disebut S.P.D (Sekolah Politik Dasar).

Mata pelajaran yang diajarkan dalam Sekolah Pemuda Rakyat adalah ;

1. Filsafat Materialisme Dealektika dan Histori (MDH).

Mata pelajaran MDH adalah mata pelajaran yang utama dalam SPD, MDH wajib dipahami calon-calon kader Pemuda Rakyat, karena dalam mata pelajaran ini calon kader akan diajarkan bagaimana cara berfikir yang benar , analisis permasalahan-permasalahan sosial ekonomi, politik dan budaya dengan melihat azas salaing keterkaitan dari setiap permasalahan yang ada sehingga setiap calon kader mampu melihat sebuah permasalahan dari sejarahnya, latar belakang subjek dan kepentingannya, kemana arah

pergerakan permasalahannya, maka calon kader akan mampu memberikan solusi yang bijak dalam pemahaman dan pencarian solusi yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini akan dilatih secara terus-menerus sampai seorang calon kader mempunyai kemampuan sendiri untuk menemukan, merumuskan dan menjawab sebuah permasalahan.

2. Bagaimana Masyarakat Berkembang (BMB):

- Dalam Bagaimana Masyarakat Berkembang (BMB) diajarkan mulai dari Zaman Primitif, Zaman Batu, Zaman Tembaga, Zaman Besi, Zaman Barter, Feodalisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Imperialisme, kemudian diajarkan Masyarakat Sosialisme dan Komunisme. Mata pelajaran ini sangat penting bagi calon kader agar mampu memahami perilaku, pola pikir dan cara manusia menjalankan sebuah sistem kemasyarakatan dari zaman-kezaman sesuai dengan keadaan zaman dan tingkat pengetahuan manusia, sehingga dapat dirumuskan sejarah perkembangan, serta pola pikirnya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir, sosial budaya dan perpolitikan di berbagai belahan dunia saat ini.
- Prinsip Dalam Masyarakat Sosialisme adalah "Bekerja menurut kemampuan, menerima menurut hasil kerjanya."
- Prinsip dalam Masyarakat Komunisme adalah "Bekerja menurut kemampuan menerima menurut kebutuhan".

3. Pelajaran Ketiga adalah ; Soal Pokok Revolusi

Dalam mata pelajaran ini diajarkan tentang Geografis Indonesia, mana kawan dan mana lawan dalam dan luar negeri yang mana kekuatan progresif Revolusioner

Dan yang mana Reaksioner, mana kaum borjuasi, kapitalisme nasional, kekuatan-kekuatan yang harus dirangkul adalah; Kaum Tani, Buruh Tani, Nelayan Buruh Nelayan dan yang lainnya, sehingga kader-kader Pemuda Rakyat tidak mudah terpancing dengan isi dan agitasi yang setiap saat berkembang dalam perpolitikan Indonesia.

2. Seksi Organisasi

Seksi organisasi bekerja mengontrol kehidupan organisasi di tingkat Kabupaten, cabang, ranting termasuk kelompok-kelompok yang ada di ranting dan mendirikan ranting-ranting Pemuda Rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa Kabupaten Karo sekalipun. Mengajarkan tentang disiplin organisasi, disiplin anggota dan moral Pemuda Rakyat.

Tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh berjudi, mencuri, menganggur. Jangankan beristri dua, pacar dua orang pun tidak boleh, kalau ada anggota/kader Pemuda Rakyat yang melanggar, maka anggota /kader tersebut akan dipecat.

3. Seksi Kebudayaan

Pemuda Rakyat diharuskan mencintai, menghormati tradisi, adat-istiadat Suku Karo dan melestarikannya. Pemuda Rakyat diwajibkan tampil didepan pada saat ada kegiatan adat baik pesta orang meninggal maupun pesta perkawinan walaupun orang tuanya atau anaknya bukan anggota Pemuda Rakyat. Begitu juga dalam aksi sosial lainnya seperti gotong royong dengan masyarakat atau pemerintah setempat.

Kader dan anggota Pemuda Rakyat juga dilatih mempelajari kebudayaan, kesenian baik seni musik, seni tari maupun seni suara. Musik Band dan Drum Band.

4. Seksi Front Pemuda

Menggalang kekuatan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Tanah Karo dan mengkonsolidasikannya dalam Front Pemuda untuk mengikapi situasi lokal (Tanah Karo), Nasional dan Internasional, misalnya pengiriman relawan pada saat perebutan Irian Barat pada tahun 1962 dan konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam pembebasan Kalimantan Utara pada tahun 1963.

5. Seksi Olah Raga

Pada akhir 1964 dan awal tahun 1965 Pimpinan Daerah Pemuda Rakyat mengadakan latihan olah raga, yaitu Judo dan Pencak Silat latihan diadakan dua tahap. Tujuan olah raga tersebut adalah suatu keharusan bagi Pemuda Rakyat mempunyai keterampilan dalam membela diri. Dalam pendidikan olah raga tersebut dibarengi dengan pendidikan Ideologi dan Politik.

6. Seksi Ekonomi

Pemuda Rakyat pada tingkat cabang mengkoordinir anggota-anggota pemuda tingkat ranting untuk mengerjakan lahan-lahan kolektif, menanam Padi, Jagung sebagai sumber kas organisasi.

Pada ulang Tahun Partai Komunis Indonesia yang diadakan pada tanggal 20 Mei 1964 Ketua PKI D.N Aidit menyatakan “ Pemuda Rakyat adalah Pembantu Setia dan terpercaya Partai Komunis Indonesia, Maka Pemuda Rakyat adalah Komunis-komunis Muda”.

4.3 Aktivitas Eksternal Pemuda Pemuda Rakyat

Di Tanah Karo ada dua Partai Yang saling berlomba untuk merebut hati rakyat termasuk dominasi terhadap pemerintah daerah yaitu; Partai Komunis

Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhainisme. Pada tahun 1954 dan Pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955 sampai tahun 1960-an, PNI masih unggul di hati masyarakat maupun dalam eksekutif dan legeslatif. Demikian juga organisasi kepemudaan yang masing-masing berusaha merebut hati dan simpati para pemuda Karo yaitu Pemuda Rakyat dan Pemuda Demokrat atau disebut juga dengan Pemuda Marhaenisme.

Pemuda Rakyat adalah organisasi massa Partai Komunis Indonesia dan organisasi Pemuda Demokrat adalah organisasi massa Partai Nasional Indonesia, akan tetapi pada awal tahun 1961 P.K.I dan ormasnya Pemuda Rakyat mulai maju dengan pesatnya, ini dapat dilihat dari pada perayaan hari-hari besar seperti perayaan 17 agustus, perayaan 1 Mei dan perayaan-perayaan lainnya, tempat perayaan upacara seperti Kota Kaban Jahe dan Lapangan Merdeka menjadi lautan merah kemajuan ini menjadikan PKI dan ormasnya sebagai organisasi yang paling besar di Tanah Karo, sehingga P.N.I dan Pemuda Demokrat menganggap P.K.I dan ormasnya sebagai musuh dan lawan politiknya. Ini semua disebabkan rendahnya pendidikan politik mereka, karena mereka tidak tau (P.N.I dan Pemuda Demokrat) apa yang ditulis Soekarno dalam Biografinya “Lahirnya P.N.I adalah untuk melanjutkan cita-cita revolusi P.K.I yang gagal akibat dari pemutar balikan fakta peristiwa Madiun 1948.”³²

Intrik-intrik baru mulai bermunculan, namun pada tahun 1962 perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 serta pembebasan Kalimantan Utara Pemuda Rakyat Tanah Karo berhasil

³²Wawancara dengan Jenda Tarigan, Seketaris I Pemuda Rakyat Tanah Karo dan anggota Pleno CDB PKI 1962

menghimpun seluruh kekuatan kepemudaan dalam satu wadah yang dinamakan Front Pemuda Tanah Karo. Dan pada tahun 1964 Pemuda Rakyat mengadakan apel besar di depan kantor D.P.R.D Tanah Karo sekaligus menyatakan sikap:

1. Mendukung sikap pemerintah dalam membela persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia..
2. Memberikan partisipasi aktif kepada pemerintah daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Karo.

Untuk lebih mengeratkan hubungan diantara organisasi kepemudaan, Front Pemuda Tanah Karo Mengadakan pertandingan catur . Pemuda Rakyat juga mengundang Pimpinan Front Pemuda dan perwakilan organisasi kepemudaan yang ada di Tanah Karo.

4.4 Menjelang Pecahnya Peristiwa 30 September 1965

Pada tanggal 25 September 1965 Wakil Komite Daerah Besar Sumatera Utara (C.D.B.P.K.I.S.U) turun ke Komite Seksi (C.S) P.K.I untuk menyampaikan informasi situasi Nasional (Jakarta). Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan partai dari kecamatan maupun dari pimpinan Pemuda Rakyat dari Kabupaten/Kecamatan ada juga dari ranting. Utusan itu menyampaikan dan menjelaskan ;

“Bahwa di pusat sudah terbentuk Dewan Jendral tujuannya untuk meng-Cup pemerintahan Soekarno”.

Untuk menandingi Dewan Jendral tersebut ada juga dari kalangan Perwira-Perwira menengah Angkatan Darat telah membentuk Dewan Prajurit. Jadi untuk

mengetahui perkembangan situasi selanjutnya untuk itu kita harus aktif mendengarkan radio. Masalah ini murni kontradiksi Angkatan Darat, dalam hal ini sikap kita tetap membela dan mendukung pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Soekarno-Hatta. Oleh karena itu kami anjurkan supaya pimpinan partai, kader partai dan pimpinan Pemuda Rakyat dan kader-kadernya tetap waspada dan situasi ini sampaikan kepada kawan-kawan yang di cabang dan di ranting. Dan kita tetap menggalang Front Persatuan Nasional (F.P.N).

Pada tanggal 2 oktober 1965 siaran Radio Republik Indonesia jam 6 (enam) sampai jam 10 (sepuluh) pagi mengatakan di Jakarta sudah terjadi peristiwa *Gerakan 30 September*, gerakan tersebut telah membunuh 7 (tujuh) Jenderal, pembunuhan itu sangat kejam dan biadab tidak berprikemanusiaan dan Jenazah ketujuh Jenderal tersebut sudah ditemukan didalam sumur tua yang selanjutnya dikenal dengan "*lobang buaya*".

Tanggal 5 Oktober 1965 siaran Radio Pusat dan Harian Angkatan Bersenjata mulai menyiarkan dan mempublikasikan, bahwa Gerakan 30 September 1965 itu didalangi oleh P.K.I dan ormas-ormasnya, dan yang melakukan pembunuhan para Jenderal itu adalah Pemuda Rakyat dan Gerwani. Di saat yang sama masyarakat Sumatera Utara dan Tanah Karo Khususnya ingin mengetahui keadaan Presiden Republik Indonesia, Soekarno-Hatta.

Soekarno rupanya memahami perasaan pikiran rakyatnya, maka pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Soekarno berbicara melalui siaran radio, Presiden Soekarno mengatakan; " Saya dalam keadaan sehat walafiat, Peristiwa itu bukan Gerakan 30 September, tapi Gerakan Satu Oktober (GESTOK) adalah masalah politik

dan penyelesaiannya secara politik, dan saya mengharapkan rakyat Indonesia tenang”.

Walaupun Presiden Soekarno sudah mengharapkan supaya rakyat tenang dan mengatakan persoalan adalah masalah politik dan penyelesaiannya secara politik, radio dan media massa, terutama Harian Angkatan Bersenjata makin gencar mengatakan bahwa peristiwa 30 September itu adalah P.K.I. Malah “Harian Angkatan Bersenjata” Mengorbitkan gambar selebar 3x3 cm yang didalamnya terdapat gambar pisau, garpu, yang kurang jelas dan mengatakan bahwa inilah alat-alat yang dipergunakan oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani untuk membunuh dan mencongkel mata para Jenderal. Rupanya siaran radio dan pemberitaan surat-surat kabar itu spontan membangkitkan kemarahan dan emosi pemerintah daerah dan aparatnya, partai-partai politik, organisasi pemuda serta agama. Mulailah Aparat dan Pemerintah Tanah Karo mengintip kantor Partai Komunis dan Kantor Pemuda Rakyat dari Kabupaten sampai cabang dan desa.

Pada awal bulan September 1965 Pemerintah Daerah Karo memerintahkan kepada setiap camat di Tanah Karo agar setiap Kepala desa di wilayahnya masing-masing mewajibkan pimpinan-pimpinan Partai Komunis anggota-anggota, kader-kader serta ormasnya hadir di kantor camat. Di kantor camat pemerintah meminta supaya pimpinan Partai Komunis Kecamatan, Pemuda Rakyat dan seluruh ormasnya membubarkan diri sebagai pernyataan tidak setuju atas tindakan P.K.I dan tindakan Pemuda Rakyat di Jakarta.

Tujuh hari sebelum peristiwa 30 September partai-partai politik, organisasi-organisasi pemuda dan agama menganggap P.K.I dan Pemuda Rakyat adalah lawan politiknya bukan kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme.

Demikian di Tanah Karo seluruh partai politik, agama yang dipelopori oleh P.N.I dan organisasi kepemudaan yang dipelopori oleh Pemuda Demokrat atau Marhaenis, bersatu dalam dalam satu wadah yang mereka namakan *Komando Aksi* yang menjadi ujung tombak Pemerintah Daerah Karo untuk mengikis habis dan menghancurkan P.K.I dan ormas-ormasnya. Komando Aksi melaporkan, mengejar, menangkap, menyiksa, dan mengantarkan kader partai Komunis dan Pemuda Rakyat yang ditangkap kemudian dipenjarakan dan bagi anggota-anggota partai dan ormas Pemuda Rakyat baik laki-laki maupun perempuan disuruh wajib lapor ke pos-pos Komando Aksi.

P.N.I dan Pemuda Marhaenisme Tanah Karo merasa bangga dan menang, tetapi mereka tidak tahu sama sekali dengan hancurnya P.K.I dan ormas-ormasnya adalah kehancuran Soekarno, dan P.N.I sendiri, ini terbukti dibekukannya P.N.I dan ormasnya di Sumatera Utara oleh Panglima T.N.I Bukit Barisan yang bernama Sarwo Edi pada tahun 1968-1969.

4.5 Situasi Pemuda Rakyat Setelah Peristiwa Gerakan 30 September

Sepulang dari kantor Pemuda Rakyat Kaban Jahe, kader Pemuda Rakyat daerah dan cabang terus menyampaikan informasi yang disampaikan C.D.B kepada tiap-tiap kecamatan dan ranting Pemuda Rakyat didesa. Pesannya hanya tiga pokok;

tenang, waspada, dan tunggu komando³³, yang dinantikan sudah datang tanggal 2 Oktober 1965 radio pusat menyiarkan telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh Jenderal di Jakarta dan jenazah ke tujuh Jenderal itu dikubur dalam sumur tua lobang buaya. Para Pemuda Rakyat daerah, cabang dan ranting menunggu informasi dari Medan (Tingkat Sumatera Utara). Namun, yang ditunggu tidak kunjung datang. Mulai pada tanggal 9 Oktober 1965 Pemuda Rakyat mencium situasi yang semakin buruk³⁴, karena pada tanggal 10 Oktober 1965 aparat-aparat negara mulai mengintip kantor partai Komunis dan Pemuda Rakyat di Kabanjahe. Pimpinan Pemuda Rakyat Daerah mengadakan pertemuan darurat dan menyimpulkan “menyelamatkan pimpinan partai dan kader-kader daerah dengan cara menyingkir dulu jangan masuk kantor, dan tunggu informasi selanjutnya”. Kemudian keesokan harinya pimpinan Pemuda Rakyat Daerah mengadakan kembali pertemuan darurat dan menghasilkan keputusan bahwa Pemuda Rakyat Daerah mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis yang kemudian dikenal dengan; C.B (Comite Bayangan).³⁵ Comite ini bekerja menunggu dan mencari informasi bagaimana garis dan sikap selanjutnya.

Info yang pertama didapat bahwa aparat Pemerintah Daerah akan mengadakan razia di kantor P.K.I dan Pemuda Rakyat, kemudian informasi tersebut cepat

³³Wawancara dengan Jenda Tarigan, Seketaris I Pemuda Rakyat Tanah Karo dan anggota Pleno CDB PKI 1962

³⁴Wawancara dengan Ambil Ginting, Anggota Pleno Pemuda Rakyat KAB. Karo, Guru Sekolah Ideologi Kabupaten Karo (1956-1965) dan sampai sekarang pertua di Gereja GBKP Kandibata.

³⁵*Comite Bayangan* dibuat untuk menjalankan roda organisasi partai, karena setelah peristiwa 30 September, karena pimpinan partai diungsikan untuk keamanan. Wawancara dengan Jenda Tarigan, Seketaris I Pemuda Rakyat Tanah Karo dan anggota Pleno CDB PKI 1962.

disampaikan keseluruh cabang, ranting dan kantor-kantor P.K.I dan Pemuda Rakyat, kemudian menyusul informasi yang kedua yang mengatakan Pimpinan partai dan kader-kader daerah, pimpinan Pemuda Rakyat dan kader-kader daerah serta ormas-ormasnya akan ditangkap oleh aparat dan Komando Aksi.

Dengan informasi yang diperoleh tersebut maka dengan segera pimpinan dan kader-kader partai, pimpinan Pemuda Rakyat dan kader-kadernya beserta Gerwani dan yang lainnya menyingkir ke gunung dan hutan menyelamatkan diri menunggu penyelesaian.

Tanda-tanda akan adanya penyelesaian sangat jauh dari yang diharapkan, bahkan tekanan semakin keras terhadap partai Komunis dan Pemuda Rakyat. Selanjutnya menyusul informasi yang terakhir selamatkan diri masing-masing sehingga satu demi satu kader partai Komunis, Pemuda Rakyat dan Gerwani ditangkapi oleh aparat dan Komando Aksi yang kemudian dipenjarakan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Terlepas dari pro dan kontra dalam kekelaman sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak bisa dipungkiri bahwa peranan Pemuda Rakyat dalam mengisi dan mewarnai kemerdekaan sangat besar khususnya dalam hal pendidikan politik, sehingga bangsa Indonesia mempunyai posisi tawar dan diperhitungkan dalam pergaulan regional Asia dan internasional dengan pengadaan sekolah-sekolah rakyat juga melalui forum dan diskusi-diskusi yang diadakan Pemuda Rakyat sampai ke tingkat group di dusun-dusun terpencil sekalipun.

Pemuda Rakyat juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mengkonsolidasikan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dalam satu wadah Front Pemuda (FP) membela negara yang banyak melahirkan relawan-relawan dalam menjaga integrasi NKRI yang sering mendapat gangguan baik dari dalam maupun luar negeri yang sangat ingin menguasai wilayah-wilayah Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam, ini dapat dilihat ketika Konfrontasi dengan Malaysia ingin menguasai pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka yaitu Ambalat dan Sepadan, merebut Irian Barat dan pembebasan Kalimantan Utara. Demikianlah peranan Pemuda Rakyat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sehingga rakyat selalu mendukung dan simpati kepada PKI, khususnya Pemuda Rakyatnya.

Peristiwa Gerakan 30 September merupakan bencana bagi Pemuda Rakyat, walaupun Ir. Soekarno tidak pernah menyatakan “ bahwa PKI dan ormas-ormasnya

berusaha meng-Coup kekuasaannya”, namun opini yang dikembangkan oleh militer khususnya Angkatan Darat (AD) telah mampu menggerakkan hati nurani manusia menjadi binatang membantai manusia-manusia yang berbau Komunis, bersama dengan ditangkap dan dibunuhnya pimpinan dan kader-kadernya, maka berakhirilah masa-masa manis PKI dan Ir. Soekarno mewujudkan cita-cita Marxisme dan Marhaenisme.

DAFTAR PUSTAKA